

**IMPLEMENTASI PROGRAM GERBANG DESA SABURAI DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG  
(Studi Kasus di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**OKTAVIA DWI SAKTI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**ABSTRACT****IMPLEMENTATION OF SABURAI VILLAGE GATE PROGRAM IN  
POVERTY ERADICATION IN LAMPUNG PROVINCE (Case Study in  
Pakuan Aji Village Sukadana District East Lampung Regency)****By****OKTAVIA DWI SAKTI**

Lampung Province is on the tenth ranks among the poorest provinces in Indonesia and on the third ranks among the poorest provinces in Sumatra. Moreover, Lampung Province still has 380 villages with an underdeveloped village status. So that in the effort of poverty eradication and alleviation of disadvantaged villages, the Government of Lampung Province launched a program called the Saburai Village Gate Program.

This study intend to describe the implementation of Saburai Village Gate Program in Pakuan Aji Village, Sukadana District, East Lampung Regency. The research method used is descriptive research with qualitative approach.

The results of this study indicate that the implementation of Saburai Village Gate Program in Pakuan Aji Village Sukadana District East Lampung Regency has been running quite well. This is because the implementers in implementing the Saburai Village Gate Program in Pakuan Aji Village have followed the Standard

Operating Procedure (SOP) which is in the form of Operational Technical Manual (PTO). Furthermore, the implementation of the Saburai Village Gate Program in Pakuan Aji Village for three years from 2015, 2016 and 2017 has been able to achieve the goal of the Saburai Village Gate Program although not yet maximally. Then it has also been able to improve the infrastructure in Pakuan Aji Village in the form of 4050 meters of road substratum, 12 pieces of culvert, and 300 meters of embankment.

**Keywords: Program Implementation, Poverty, Saburai Village Gate Program**

**ABSTRAK****IMPLEMENTASI PROGRAM GERBANG DESA SABURAI DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG  
(Studi Kasus di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur)****Oleh****OKTAVIA DWI SAKTI**

Provinsi Lampung menempati urutan ke sepuluh provinsi termiskin di Indonesia dan peringkat ke tiga provinsi termiskin di Sumatera. Di samping itu, Provinsi Lampung masih memiliki 380 desa yang berstatus desa tertinggal. Sehingga dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengentasan desa tertinggal, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan sebuah program yang disebut dengan Program Gerbang Desa Saburai.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung timur

sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut karena para implementer dalam melaksanakan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji telah mengikuti *Standart Operating Procedure* (SOP) yaitu berupa buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Selain itu, pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji selama tiga tahun terhitung dari tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 telah mampu mencapai tujuan dari Program Gerbang Desa Saburai walaupun belum secara maksimal. Kemudian juga telah mampu meningkatkan infrastruktur di Desa Pakuan Aji berupa jalan *onderlagh* sepanjang 4050 meter, gorong-gorong 12 buah, dan tanggul penahan tanah sepanjang 300 meter.

**Kata Kunci: Implementasi Program, Kemiskinan, Program Gerbang Desa Saburai**

**IMPLEMENTASI PROGRAM GERBANG DESA SABURAI DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG  
(Studi Kasus di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh

**OKTAVIA DWI SAKTI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM GERBANG  
DESA SABURAI DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI  
PROVINSI LAMPUNG (Studi Kasus di Desa  
Pakuan Aji Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Nama Mahasiswa : Oktavia Dwi Sakti**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1416041076**

**Program Studi : Ilmu Administrasi Negara**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**MENYETUJUI**  
**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si**  
**NIP 19750720 200312 1 002**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Noverman Duadji', is written over the text of the second member of the supervisory committee.

**Dr. Noverman Duadji, M.Si**  
**NIP 19691103 200112 1 002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si**



**Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H., S.AN., M.PA**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya**  
**NIP. 19590803 198603 1 003**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 April 2018**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 17 April 2018

Membuat pernyataan,



**Oktavia Dwi Sakti**  
NPM. 1416041 076

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Oktavia Dwi Sakti lahir di Bekasi tanggal 1 Oktober 1996. Penulis merupakan anak Kedua dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak Amat Zaeni dan Ibu Ir.Sugiyem. Penulis sangat beruntung dan bersyukur karena telah dilahirkan dalam keluarga ini. Pendidikan yang

ditempuh penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Pakuan Aji yang diselesaikan tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP PGRI 2 Sukadana yang diselesaikan tahun 2010, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Metro yang diselesaikan tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan KKN di Desa Ono harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP sebagai anggota, dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sebagai Anggota Bidang Rumah Tangga Organisasi (RTO).

## MOTO

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memeberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.  
Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah.

Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung.”  
(QS. Ath-Thalaq: 2-4)

*“Start where you are.  
Use what you have.  
Do what you can”  
(Arthur Ashe)*

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.”  
(QS. Ar-Rahman:60)

*I have not failed.  
I've just found 10,000 ways  
that won't work  
(Thomas Edison)*

## PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kuucapkan syukur atas karunia Mu kepadaku

*Kupersembahkan karya kecil ini untuk:*

*Ibuku tercinta Ir.Sugiyem  
Bapakku tercinta Amat Zaeni, Amd.P  
Ayahku tercinta Suyanto*

Selalu menjadi sumber inspirasi dalam kehidupanku. Selalu mendoakan dan mendukung segala aktivitasku hingga sekarang. Semua curahan kasih sayang yang

kalian berikan tidak mampu aku gantikan dengan apapun.

*Very Prio Nugroho,Amd.F  
Agustin Putri Ningtias  
Chindy Raisica Sabila*

Kehadiran kalian menyempurnakan hidupku

Semoga kita berhasil dan selalu menjadi kebanggaan orang tua.

*Seluruh keluarga besarku, sahabat-sahabatku, dan teman-temanku yang  
selalu mendukungku.*

Terima kasih atas semua dukungannya

*Para pendidik dan Almamater tercinta Universitas Lampung*

## SANWACANA

Alhamdulillahirrabil'alamin segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas segala kehendak dan kuasa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Implementasi Program Gerbang Desa Saburai dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung (Studi Kasus di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Ibu, Bapak dan Ayah tercinta. Terima kasih atas kasih kasayang yang tidak pernah putus, terima kasih telah mendidik dan membesarkanku hingga aku menjadi seperti sekarang, terima kasih atas kesabarannya dalam mengajarku, memberikan perhatian, semangat, dukungan dan doa yang tiada hentinya

untuk hari-hariku, masa depanku dan kesuksesanku. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, keberkahan rezeki, dan umur yang panjang untuk Ibuku, Bapakku, dan Ayahku. Terima kasih banyak, ini semua berkat kalian;

2. Kakak penulis Verry Prio Nugroho, A.md.F yang tidak pernah hentinya menanyakan tentang skripsi kepada penulis, terima kasih atas kasih sayang, semangat, dukungan dan bantuannya selama ini, semoga lekas menyelesaikan pendidikan S1 nya dan semoga kita bisa menjadi kebanggaan orang tua;
3. Adik-adik penulis Agustin Putri Ningtias dan Chindy Raisica Sabila terima kasih atas kasih sayang, semangat, dukungan, dan bantuannya selama ini, semoga lekas menyelesaikan pendidikan DIII dan S1 nya dan semoga kita bisa menjadi kebanggaan orang tua;
4. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara;
6. Ibu Intan Fitri Meutia, S.AN., MA., Ph.D
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing utama sekaligus pembimbing akademik. Terima kasih Bapak atas arahan, nasehat, saran, masukan, waktu, kesabaran, ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan;

8. Bapak Izzul Fatchu Reza, S.AN., M.PA. yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing kedua. Terima kasih Bapak atas arahan, nasehat, saran, masukan, waktu, kesabaran, ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan;
9. Bapak Simon Sumanjoyo H., S.AN., M.PA. yang telah berkenaan menjadi pembahas. Terima kasih Bapak atas kritik, saran, arahan, waktu serta kesabaran yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan;
10. Kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Pak Eko, Pak Nana, Pak Bambang, Prof Yuli, Pak Syamsul, Ibu Rahayu, Ibu Dewi, Ibu Selvi, Ibu Ita, Ibu Meli, Ibu Intan, Ibu Novita, Ibu Dian, Ibu Anisa, Ibu Devi, terima kasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya;
11. Bapak Johari dan Bapak Azhari selaku Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang banyak membantu dalam hal kelancaran administratif. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya selama ini;
12. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung dan Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai;

13. Bapak Amir selaku Koordinator Provinsi Program Gerbang Desa Saburai.  
Terima kasih pak atas kesediaannya dan keramahannya dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis;
14. Bapak Tan Malaka, dan Bapak Ahmad Yudianto, Bapak Linus Hertanto selaku aparaturnya Desa Pakuan Aji. Terima kasih atas keramahannya dan kesediaannya untuk diwawancarai dan memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis;
15. Terima kasih Kepada Bapak Mugi, Bapak Mardian, Ibu Tini, dan Ibu Eka atas kesediaannya dan kerahamannya untuk diwawancarai oleh penulis;
16. Bapak Budi, Ibu Marseh, Rindy, Kak Panji dan Dani terima kasih telah menjadi rumah ke dua untuk penulis. Terima kasih atas kebaikan, kasih sayang, semangat, dukungan dan bantuannya selama ini;
17. Kepada Enam wanita hebat (Ranicuhh) Rani Isnani sahabat penulis dari awal masuk perkuliahan hingga masa perkuliahan ini berakhir, orang yang selalu menjadi kelompok dalam setiap tugas perkuliahan, Ara (Mutiara Septiani Eka Puti) wanita *perfectionist* yang selalu ingin terlihat cool di depan semua orang, nimah (Ni'mah Aulia Hidayah) wanita yang tidak memiliki perasaan dan hati karena tidak dapat menangis, (Gustong) Gusty Ayu Anggraini tukang *make up* andalan untuk kami berenam, gus buruan nyusun skripsi jangan nyantai-nyantai terus, Nuy (Nur Arifah) wanita paling alim diantara kami berenam, yang selalu memberikan kajian-kajian islami, Ajun (Astri Juniar Wulan) orang yang super sibuk, jarang bisa ikut kumpul, yang menurut penulis judul skripsinya paling bagus dan susah. Terima kasih atas



kebersamaannya selama menempuh masa perkuliahan, terima kasih atas dukungan, semangat, canda, tawa, saran, masukan dan pengalaman hidup yang sangat berarti. Semoga kita menjadi wanita-wanita sukses dunia maupun akhirat seperti nama grup *WhatsApp* kita, semoga dapat dipertemukan kembali dan mencapai cita-cita yang kita inginkan;

18. Teman-teman kosan upca 46 (nep) Nevi Setyaningsih orang yang kemana-mana selalu sendirian, selalu mau direpotkan oleh penulis, selalu menemani penulis, selalu menjadi teman debat dikosan, (mba tia) Tia Fatmasari mba kosan yang selalu mau beli makan dan jajan walaupun hujan, walaupun udah tengah malam, (mba karina) Karina Sylfia Dewi mba kosan yang jarang dikosan karena kesibukannya dengan organisasi, (mba intan ndut) Intan Rosela induk kosan 46 yang selalu ngasih makan, jajan kalo pas dia gajian, induk terbaik, (Mba Kaka) Klara Nalarita laki-laki kosan 46 wkwk, (siska) Siska Marvita Sari anak paling kecil di kosan, dan (orang baru) Inten Indriyana terima kasih selalu mau minjem casan laptopnya hehe. Terima kasih atas canda tawa, dukungan, motivasi, saran, bantuan dan kebersamaannya selama ini. Semoga kita bisa menjadi wanita sholeha dan kebanggaan orang tua.

19. Terima kasih Kepada (Nuy) Nisa Nurlela wanita terbaik yang pernah penulis temui, terima kasih telah menjadi sahabat penulis yang bermula dari 40 hari KKN di Kampung Ono Harjo, terima kasih selalu memberi bantuan, dukungan, motivasi, kasih sayang, canda dan tawa, Tupis (Taufik Hidayat) lelaki yang selalu mau direpotkan oleh penulis, terima kasih atas kesabaran,

bantuan, dukungan, motivasi, semangat, kasih sayang, canda dan tawanya selama ini, (Hulk) Nuril terima kasih selalu mem*follow up* penulis dalam menyusun skripsi, dan selalu menyemangati penulis, (Cemong) Amilia, Ritma Ratri, Ana, Arifin, Angger, Bayu, Dian, Bima, Yahya, terima kasih atas canda, tawa, bantuan, dan dukungan yang diberikan selama penulis menyusun skripsi. Semoga kita menjadi pribadi yang baik dan kebanggaan orang tua.

20. Teman-teman KKN Ono Harjo. (mba ila) Tartila Fajar Masyrifah temen beli jajan pas KKN, makannya banyak tapi gak bisa gendut, (Kordes Mora) Morales Sibarani kordes paling baik, konyol, sayang sama anggotanya hehe, temen nonton kalo gak ada temen yang bisa diajak nonton, (Bu Dokter) Luh Dina Yulita wanita dewasa, pekerja keras, pinter dan kalo tidur selalu ga bergerak sama sekali, (Abang) Fajar Syukron anggota paling royal, baik, suka ngelawak, tapi kadang peak, semoga cepet lulus ya bang kuliahnya, dan Bang Evan orang paling mandiri sedunia, kayaknya punya dunia sendiri abang satu ini. Terima kasih atas pengalaman luar biasanya selama 40 hari di Kampung Ono Harjo, terima kasih telah menjadi keluarga selama 40 hari, merasakan susah, senang bersama. Bukan KKN sih, lebih tepatnya pindah tidur ya. Tidak lupa pula terima kasih kepada Ibu induk semang kita yang telah mengizinkan kami tinggal di rumahnya, telah mengurus kami selama 40 hari. *Pakde* Rin, Bapak Kepala Desa Ono Harjo, Bu Nur Aini, terima kasih telah menerima kita dengan baik untuk melaksanakan KKN di sana, membantu keperluan kita, dan mengajak kita jalan-jalan. Terima kasih kepada Opik, kak Endry, Ibu dan Bapak Opik yang telah memperbolehkan rumahnya untuk menjadi tempat

menagajari anak-anak belajar saat KKN. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kampung Ono Harjo atas sambutan baiknya kepada kami;

21. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara 2014 (GELAS ANTIK) (Deska, Septika, Ririn, Niza, Yumas, Rydho, Anisa, Deni, Maya, Nabila, Martiana, Pranita, Dinda, Tije, Nabila Cho, Roi, Isti, Istie, Ferdian, Tari, Ely, Ela, Dwik,, Suci, Ana, Siska, Desy, Mia, Black, Satria, Refi, Hiro, Adi, Sandi, Hasan, Dito, Binter, Fatra, Andra, Nadia, Anggi, Dian, Alvin) dan teman gelas antik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan semua disini.
22. Bang Samid (Dimas Cahyo) sebagai partner penelitian, terima kasih bang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, dan telah menemani penulis dalam melakukan wawancara penelitian.
23. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih untuk semuanya.

Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aaminn

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

Oktavia Dwi Sakti

## DAFTAR ISI

Halaman

**DAFTAR ISI.....i**

**DAFTAR TABEL.....iii**

**DAFTAR GAMBAR.....v**

<b>I.</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	11
	C. Tujuan Penelitian.....	12
	D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>II.</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
	A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik .....	13
	1. Pengertian Kebijakan Publik .....	13
	2. Proses Kebijakan Publik .....	14
	B. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik .....	16
	1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	16
	2. Model-Model Implementasi Kebijakan .....	17
	C. Tinjauan tentang Desa .....	23
	1. Pengertian Desa .....	23
	2. Dari Desa Lama Menuju Desa Baru .....	24
	3. Desa Bergerak Membangun Ekonomi .....	28
	D. Tinjauan tentang Program .....	29
	E. Tinjauan tentang Kemiskinan.....	32
	1. Pengertian Kemiskinan .....	32
	2. Klasifikasi Kemiskinan.....	33
	F. Tinjauan tentang Program Gerbang Desa Saburai .....	34
	1. Profil Gerbang Desa Saburai .....	34
	2. Tujuan Program Gerbang Desa Saburai .....	36
	3. Sasaran Lokasi Program .....	37
	4. Jangka Waktu Pelaksanaan Program .....	37

5.	Prinsip Dasar Program Gerbang Desa Saburai .....	37
G.	Penelitian Terdahulu .....	38
H.	Kerangka Pikir.....	41
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A.	Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	44
B.	Fokus Penelitian .....	44
C.	Lokasi Penelitian dan Unit Analisis .....	45
D.	Jenis dan Sumber Data .....	46
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	47
F.	Teknik Analisis Data .....	50
G.	Teknik Keabsahan Data .....	51
<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A.	Gambaran Umum Desa Pakuan Aji .....	54
B.	Hasil Penelitian .....	58
C.	Pembahasan .....	105
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>124</b>
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran.....	126
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>127</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>130</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Peringkat 10 Provinsi Termiskin di Indonesia Periode Maret 2017.....	2
Tabel 2	Peringkat 10 Provinsi Termiskin di Sumatra Periode Maret 2017.....	3
Tabel 3	Angka Kemiskinan Provinsi Lampung Periode Maret 2017.....	3
Tabel 4	Perspektif Desa Lama Vs Desa Baru.....	25
Tabel 5	Perbedaan Konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”.....	27
Tabel 6	Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung 2017.....	37
Tabel 7	Matriks Perbandingan Penelitian.....	40
Tabel 8	Daftar Informan Penelitian.....	51
Tabel 9	Daftar Dokumen.....	52
Tabel 10	Materi Sosialisasi Program Gerbang Desa Saburai 2017.....	62

Tabel 11	Organisasi Pelaksana Program Gerbang Desa Saburai dan Perannya.....	65
Tabel 12	Kriteria Menjadi Koordinator Wilayah dan Fasilitator Desa .....	67
Tabel 13	Dokumen-Dokumen Penyaluran Dana.....	79
Tabel 14	Hasil Program Gerbang Desa Saburai.....	98

## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Kerangka Pikir.....	45
Gambar 2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pakuan Aji.....	55
Gambar 3	Tahapan Program Gerbang Desa Saburai Tahun 2017.....	71
Gambar 4	IKD Desa Pakuan Aji RKPDes Desa Pakuan Aji Tahun 2016.....	73
Gambar 5	Cover dan Daftar Isi Proposal Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai 2017.....	75
Gambar 6	Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.....	78
Gambar 7	Alur Penyaluran Dana Program Gerbang Desa Saburai.....	80
Gambar 8	Pelaksanaan Pembangunan <i>Onderlagh</i> Jalan.....	83
Gambar 9	Pelaksanaan Musdes Pertanggungjawaban.....	86
Gambar 10	Alur Pengendalian.....	91
Gambar 11	Pengawasan Pengerjaan <i>Onderlagh</i> Jalan oleh Fasilitator Desa.....	92



Gambar 12	Alur Pengelolaan Pengaduan dan Masalah.....	94
Gambar 13	Bagan Implementasi Program Gerbang Desa Saburai.....	97
Gambar 14	Kendala-Kendala Pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai.....	104

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam Ali (2009: 43) merupakan upaya yang dilakukan terus-menerus untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju, baik dalam taraf hidup maupun berbagai bidang dan berbagai aspek kehidupannya. Pembangunan nasional bersifat multidimensional, sehingga dengan adanya pembangunan nasional diharapkan tercapai pemerataan di berbagai sektor, bidang maupun wilayah.

Tujuan pembangunan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi jumlah orang miskin. Berbicara masalah kemiskinan bukan merupakan isu baru, melainkan merupakan isu yang seakan abadi sepanjang jaman. Kemiskinan merupakan masalah kronis bagi negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pembangunan bangsa Indonesia selalu terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan, baik pembangunan pada masa orde lama, orde baru hingga orde reformasi atau setelah reformasi.

Sulistiyani (2017:17) menjelaskan bahwa definisi umum tentang kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha,

pendidikan, dan fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas. Berikut disajikan tabel terkait dengan sepuluh provinsi termiskin di Indonesia pada periode maret 2017:

**Tabel 1. Peringkat 10 Provinsi Termiskin di Indonesia Periode Maret 2017**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Maret 2017)	Persentase Penduduk Miskin (Maret 2017)
1	Papua	897,69 ribu	21,62
2	Papua Barat	228,38 ribu	25,10
3	Nusa Tenggara Timur	1,150 juta	21,85
4	Maluku	320,51 ribu	18,45
5	Gorontalo	205,37 ribu	17,65
6	Aceh	872,61 ribu	16,89
7	Bengkulu	316,98 ribu	16,45
8	Nusa Tenggara Barat	793,78 ribu	16,07
9	Sulawesi	417,87 ribu	14,14
10	<b>Lampung</b>	<b>1,131 juta</b>	<b>13,69</b>
	Rata-Rata Nasional	27,77 juta orang	10,64 persen

Sumber: <http://www.beritakini.co/news/naik-kelas-aceh-jadi-provinsi-termiskin-di-Sumatra/index.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa Provinsi Lampung menempati urutan kesepuluh provinsi termiskin di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, pembangunan di Lampung baik itu pembangunan dari segi fisik maupun pembangunan bagi Sumber Daya Manusianya masih sangat membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan tidak hanya untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang sejahtera, namun juga untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang bekerja atau mengurangi pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan.

Apabila tabel 1 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung menempati sepuluh besar provinsi termiskin di Indonesia, maka tabel berikut akan menunjukkan bahwa secara keseluruhan di Pulau Sumatra Provinsi Lampung menempati urutan ketiga yaitu provinsi termiskin di Pulau Sumatra.

**Tabel 2. Peringkat 10 Provinsi Termiskin di Sumatra Periode Maret 2017**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (000)	APBD/A 2017	Tingkat Pengangguran (Feb 2017)	Tingkat Kemiskinan (Maret 2017)
1	Aceh	5.096	14,76 triliun	7,39	16,89
2	Bengkulu	1.904	3,18 triliun	2,81	16,45
<b>3</b>	<b>Lampung</b>	<b>8.205</b>	<b>6,80 triliun</b>	<b>4,43</b>	<b>13,69</b>
4	Sumatra Selatan	8.160	7,89 triliun	3,80	13,19
5	Sumatra Utara	14.102	13,03 triliun	6,41	10,22
6	Jambi	3.458	4,34 triliun	3,67	8,19
7	Riau	6.501	10,45 triliun	5,76	7,78
8	Sumatra Barat	5.259	6,24 triliun	5,80	6,87
9	Kep. Riau	2.023	3,36 triliun	6,44	6,06
10	Kep. Bangka Belitung	1.401	2,66 triliun	4,46	5,20
	Wilayah Sumatra	52,2 juta orang	64,83 triliun	5,10 persen	10,97 persen

Sumber: <http://www.beritakini.co/news/naik-kelas-aceh-jadi-provinsi-termiskin-di-Sumatra/index.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2017

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa angka tingkat kemiskinan Provinsi Lampung tahun ini sejumlah 13,69%. Jumlah ini turun 0,17% dari tahun sebelumnya pada bulan september 2016 sebesar 13,86%. Sejalan dengan penurunan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin di Lampung juga berkurang sebanyak 8,05 ribu jiwa. Totalnya menjadi 1,132 juta jiwa dibandingkan tahun 2016 lalu mencapai 1,140 juta jiwa. Berkaitan dengan posisi atau tempat tinggal para penduduk yang menjadi masyarakat miskin tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Angka Kemiskinan Provinsi Lampung Periode Maret 2017**

Kota-Desa	(Provinsi) Kemiskinan				
	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan	Persentase Kemiskinan (persen)
	2017	2017	2017	2017	2017

	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)	Semester 1 (Maret)
<b>Perkotaan</b>	228.32	1.55	0.35	420.227	10.03
<b>Pedesaan</b>	903.41	2.40	0.57	371.894	15.08
<b>Pedesaan + Perkotaan</b>	1.131.73	2.16	0.51	382.882	13.69

*Sumber: data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2017*

Berdasarkan tabel 3, penduduk miskin di Provinsi Lampung masih didominasi oleh masyarakat di daerah pedesaan, yaitu yang berjumlah hampir 80% dari total penduduk miskin di Provinsi Lampung. Adapun penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dipedesaan yaitu 20%. Fakta di atas menunjukkan bahwa kemiskinan sudah menjadi suatu identitas yang melekat dengan pedesaan seperti warisan yang diterima secara turun-temurun.

*Image* desa sebagai suatu entitas wilayah yang penduduknya miskin, umumnya disebabkan oleh faktor-faktor seperti budaya, infrastruktur yang belum memadai, tingkat pendidikan serta kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah, rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan, terbatasnya lapangan pekerjaan di desa, serta adanya ketidak merataan pembangunan antara kota dan desa.

Kondisi tersebut diperparah dengan kurang optimalnya upaya pemerintah pusat dalam menangani kemiskinan. Telah banyak program dan bantuan dana yang digelontorkan untuk menanggulangi kemiskinan di desa, namun persoalan kemiskinan tetap saja menjadi suatu benang merah yang belum dapat dicari jalan keluarnya. Berbagai upaya pemerintah melalui program-program nasional untuk

mengentaskan kemiskinan di pedesaan telah banyak dilakukan, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), PNPM-Mandiri, belum dapat memberikan hasil yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Padahal, saat ini telah ada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah hampir 1 miliar pertahun bagi setiap desa yang ada di Indonesia, namun hasil dari penyaluran alokasi dana desa tersebut belum mampu mengurangi kemiskinan. Hal ini karena anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah terdapat banyak kelemahan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, pada aspek regulasi dan kelembagaan, ditemukan sejumlah persoalan antara lain: belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri; formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan; pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa kurang berkeadilan; serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih. (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/13/warning-kpk-ada-14-potensi-masalah-dana-desa> diakses pada 5 September 2017)

Kedua, pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan antara lain: kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa; satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia; transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah; laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/13/warning-kpk-ada-14-potensi-masalah-dana-desa> diakses pada 5 September 2017)

Ketiga, pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan, yakni efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah; saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah; dan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/13/warning-kpk-ada-14-potensi-masalah-dana-desa> diakses pada 5 September 2017)

Berdasarkan beberapa kasus, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat dalam kategori miskin semakin apatis menjalani hidup karena berharap banyak dari sumbangan langsung yang terus diberikan oleh pemerintah dan pihak lain. Menyadari hal tersebut pemerintah lokal seharusnya dapat membuat terobosan dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah atau desa masing-masing dan tidak menunggu intervensi program penanggulangan dari pemerintah pusat semata, untuk itulah pemerintah Provinsi

Lampung membuat sebuah terobosan yaitu dengan meluncurkan sebuah program yang disebut dengan Program Gerbang Desa Saburai.

Program Gerbang Desa Saburai adalah sebuah program yang berfokus pada penguatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pedesaan, khususnya di desa tertinggal. Program ini memiliki slogan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai, Program Gerbang Desa Saburai diluncurkan pada akhir Desember 2015 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Program Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung tahun 2015-2019. Program Gerbang Desa Saburai merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung yang salah satu *outputnya* adalah memperpendek rentang kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

Program ini telah dimulai sejak tahun 2015, dengan tiga puluh desa induk sebagai *pilot project* yang ditangani oleh Bappeda Provinsi Lampung dan telah *dilaunching* oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung pada tanggal 17 Desember 2015, masing-masing desa tersebut mendapatkan bantuan dana Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perdesa yang diperuntukan pembangunan desa terutama infrastruktur dan ekonomi. Pada tahun 2016 ada seratus desa tertinggal di mana tiga puluh desa merupakan lanjutan tahun 2015 dan tujuh puluh desa yang telah ditetapkan melalui (surat keputusan) SK Gubernur Lampung Nomor: G/523/II.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2016, dengan bantuan dana yang diberikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perdesa. Selanjutnya, pada tahun 2017 ini sebanyak 250 desa yang beberapa desa di antaranya adalah lanjutan dari desa tahun 2015 dan 2016 serta



bantuan dana yang diberikan berkurang dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) perdesa. ([http://m.facebook.com /Bpmpd13lampung/posts/1716829\\_005195512](http://m.facebook.com/Bpmpd13lampung/posts/1716829_005195512) diakses pada tanggal 5 Oktober 2017)

Pelaksanaan Program Gerbang Desa pada kenyataannya tidak berjalan dengan lancar, hal tersebut terlihat dari hasil evaluasi Program Gerbang Desa Saburai yang dilakukan oleh pemerintah ditemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai pada tahun 2015 dan 2016, yaitu sebagai berikut. Pertama, di tahun 2016 pelaksanaan program ini belum optimal dan efektif, karena ada beberapa petunjuk teknis dalam pelaksanaan Gerbang Desa Saburai yang harus diperbaiki lagi dari petunjuk teknis yang sudah ada sebelumnya di tahun 2015. (<http://www.forumdesa.com/2017/09/agar-masyarakat-tidak-di-rugikan.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017).

Kedua, berdasarkan hasil *monitoring* dilapangan, masih ada lokasi yang kurang melaksanakan prinsip transparansi yang ditandai dengan tidak dipasangnya banner dan papan proyek Program Gerbang Desa Saburai, masyarakat tidak diberi informasi yang memadai terkait asal usul dan bagaimana program ini sampai turun ke desa. Hal ini tentu akan menghilangkan peran serta masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan desa yang akan berakibat pada rendahnya mutu kegiatan. (<http://www.forumdesa.com/2017/09/agar-masyarakat-tidak-di-rugikan.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017).

Ketiga, dalam pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai pada beberapa lokasi dinilai kurang tepat sasaran, tepat waktu pelaksanaan, tepat spesifikasi (berdasarkan proposal yang telah disetujui), tepat administrasi keuangan maupun dokumen perencanaan dan pelaporan. Serta kurang optimalnya koordinasi dengan

fasilitator Gerbang Desa dan para pihak terkait sesuai petunjuk teknis operasional (PTO) Gerbang Desa Saburai. (<http://lenteraswara.lampung.com/berita-8150-pelaksanaan-program-gerbang-saburai-dievaluasi.html> diakses pada tanggal 09 Oktober 2017)

Desa Pakuan Aji Lampung Timur merupakan salah satu dari 30 desa induk sebagai *pilot project* pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 ini, Desa Pakuan Aji juga mendapatkan kucuran dana Program Gerbang Desa Saburai lagi, hal ini karena pendekatan yang digunakan dalam Program Gerbang Desa Saburai menggunakan pendekatan pengentasan kemiskinan, sehingga hanya dengan sekali bantuan dinilai belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Pakuan Aji. Serta berdasarkan survei yang telah dilakukan ternyata Desa Pakuan Aji masih perlu untuk dibantu dalam hal pengentasan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari luas desa Pakuan Aji yaitu seluas 2.970,3 Ha sebagai desa terluas di Kabupaten Lampung Timur dan dengan jumlah penduduk sebanyak 8.765 ribu jiwa yang terbagi dalam 10 Dusun, namun sarana dan prasarana seperti sarana pendidikan yang tersedia hanya ada lima SD, dua SMP, dan belum ada SMA. Minimnya sarana pendidikan inilah yang berakibat pada tingkat pendidikan masyarakat rendah, yaitu sebagian besar hanya tamat SMP saja. Selain itu, jalan penghubung antar dusun satu dengan dusun lainnya masih dalam keadaan sangat kurang, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang banyak, dan masih terdapat beberapa dusun yang tidak ada aliran listrik.

Pelaksanaan pembangunan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji selama tiga tahun lebih difokuskan pada pembuatan infrastruktur *onderlagh* jalan, pembangunan talut, gorong-gorong dan tanggul penahan tanah (TPT). Selama tiga tahun pelaksanaan program GDS yang dilaksanakan oleh DPMD

Provinsi Lampung terdapat beberapa masalah sebagai berikut. (Disarikan dari hasil pra-riset peneliti di Desa Pakuan Aji dengan melakukan wawancara dengan bapak Ahmad yudianto selaku Tim Pelaksana Kegiatan Program GDS di Desa Pakuan Aji).

Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan badan jalan yang akan *dionderlagh*. Hal ini disebabkan karena terbenturnya kegiatan pembuatan badan jalan dengan pekerjaan masyarakat, karena mayoritas penduduk Desa Pakuan Aji bermata pencaharian sebagai petani, buruh, dan pedagang, sehingga mereka lebih cenderung enggan untuk ikut gotong royong dalam pembuatan badan jalan dan lebih memilih untuk bekerja.

Kedua, tahap pencairan dana yang dinilai terlalu lama, sehingga memengaruhi pembangunan prasarana, karena seharusnya pembangunan tersebut dapat dengan cepat dikerjakan dan diselesaikan, namun karena dana yang dicairkan melalui tiga tahapan, sehingga tidak dihindari dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terhenti di tengah pelaksanaan karena kekurangan dana.

Ketiga, proses pembangunannya yang tidak dikerjakan oleh masyarakat yaitu melalui proses pemborongan. Padahal, Program Gerbang Desa Saburai ini merupakan program yang diharapkan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat miskin baik dalam hal perencanaan, proses pembangunan maupun dalam pemeliharaan sarana dan prasarana bersama, hal tersebut tertuang dalam peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2015 tentang Program Gerbang Desa Saburai Pasal 2 ayat 2a, yaitu “meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan”.

Berdasarkan beberapa penemuan masalah di atas, terlihat bahwa pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji perlu dievaluasi dari segi implementasinya. Hal ini merupakan suatu yang harus dilakukan karena pada tahapan implementasi banyak terjadi kendala-kendala dan kekurangan dana yang mengakibatkan pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji tidak berjalan secara optimal. Masalah-masalah tersebut tersebut terpusat pada implementasi program karena pada saat implementasi kebijakan ternyata masyarakat tidak dilibatkan, dan masyarakat kurang partisipasinya serta terdapat keterlambatan dana dalam pelaksanaannya, walaupun dalam perencanaannya sudah cukup bagus untuk pelaksanaan program tersebut di Desa Pakuan Aji. Berdasarkan dari uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Program Gerbang Desa Saburai dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (studi kasus di Desa Pakuan Aji Sukadana Lampung Timur).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji penulis adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Lampung Timur?
2. Apa sajakah hasil yang telah dicapai dalam Program Gerbang Desa Saburai selama tiga tahun di Desa Pakuan Aji Lampung Timur?
3. Apa sajakah kendala-kendala dalam Implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Lampung Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Lampung Timur?
2. Mengetahui hasil yang telah dicapai dalam Program Gerbang Desa Saburai selama tiga tahun di Desa Pakuan Aji Lampung Timur.
3. Mengetahui kendala-kendala dalam Implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Lampung Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Implementasi Kebijakan Publik dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan dan bahan informasi serta rekomendasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Bappeda Provinsi Lampung untuk lebih meningkatkan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Kebijakan Publik**

#### **1. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Wilson dalam Wahab (2016:13), kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Edward dan Sharkansky dalam Rusli (2015:35) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya”. Artinya, pemerintah tidak mengerjakan sesuatu pun termasuk dalam kategori kebijakan, karena hal itu merupakan sebuah keputusan. Biasanya pertimbangan yang digunakan adalah dampak yang lebih buruk akan muncul jika keputusan diambil. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan publik sangat dominan dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan (*policy environment*).

Sementara itu, Anderson dalam Hamidi (2015:36) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dengan pengertian ini, Anderson juga

mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah unik karena berkaitan dengan institusi pemerintah, yang oleh Easton dicirikan sebagai “kekuatan pemaksa yang sah”. Lebih jauh, Anderson mencatat lima implikasi dari konsep kebijakan publik tersebut. Pertama, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. Kedua, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. Ketiga, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. Keempat, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. Kelima, kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah.

Berdasarkan beberapa pandangan tentang kebijakan publik di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih baik dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran tertentu.

## **2. Proses Kebijakan Publik**

Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Hamidi (2015:79) mengemukakan terdapat lima tahapan proses kebijakan publik sebagai berikut.

### **a. Penentuan Agenda**

Penentuan agenda merupakan proses untuk menjadikan suatu masalah agar mendapat perhatian dari pemerintah. Proses tersebut dimulai dari kegiatan pendefinisian masalah, yakni kegiatan yang

berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

b. Perumusan Alternatif

Schattschneider dalam Hamidi (2015:87) sangat menggaris bawahi signifikansi tahap ini dengan menyatakan bahwa definisi alternatif kebijakan adalah instrumen kekuasaan yang sangat hebat (*the supreme instrument of power*).

c. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan pada dasarnya adalah pengambilan keputusan terhadap alternatif kebijakan yang tersedia. Penetapan kebijakan menurut Kraft & Furlong yang diikuti Hamidi (2015:94) merupakan mobilisasi dari dukungan politik dan penegasan (*enactment*) kebijakan secara formal termasuk justifikasi untuk tindakan kebijakan.

d. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi kebijakan. Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat dari implementasi kebijakan.



Berdasarkan kelima tahap kebijakan publik di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada tahap implementasi, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Lampung Timur.

## **B. Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan. Matland dalam Hamidi (2015:98) mencatat bahwa literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan kelompok pendekatan dari bawah (*bottom-up*). Berikut beberapa definisi implementasi kebijakan yang dikutip oleh Anggara (2012:530-532), yaitu sebagai berikut.

- a. Wahab dalam Anggara (2012:530) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden.
- b. Grindle dalam Anggara (2012:531) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam

prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

- c. Cleaves dalam Anggara (2012:531) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dianggap sebagai proses tindakan administrasi dan politik (*a process of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps*).

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh ketiga ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan dari keputusan yang diambil pemerintah, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut.

## **2. Model-Model Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dalam siklus keseluruhan kebijakan, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Ada banyak variabel dan faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Semua faktor itu memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam proses pelaksanaan kebijakan. Masing-masing faktor itu bisa disederhanakan dalam bentuk model untuk melihat bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam pelaksanaan kebijakan

dalam mencapai tujuannya. Berikut beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli:

a. Model Implementasi George C. Edwards III

George C. Edwards III dalam Anggara (2012:541-542) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor kritis yang mendukung, yaitu:

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi atau sikap pelaksana
- 4) Struktur birokrasi.

b. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Van Horn dalam Rusli (2015:105) disebut sebagai *A Model Of The Policy Implementation Process* (model proses implementasi kebijakan). Berdasarkan model implementasi kebijakan ini, bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, yang terdiri dari :

- 1) Standar Dan Sasaran Kebijakan.
- 2) Sumber Daya
- 3) Hubungan Antar Organisasi
- 4) Karakteristik Agen Pelaksana
- 5) Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik.
- 6) Disposisi Implementor

c. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Mazmaniar dan Sabatier dalam Rusli (2015:108-109) menyatakan bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan tahapan implementasi. Selanjutnya, variabel-variabel tersebut secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori variabel bebas, yaitu:

- 1) Risalah tentang tingkat kesulitan permasalahan yang akan dikendalikan, dengan indikator:
  - (1) Ketersediaan teori teknis dan teknologi yang valid;
  - (2) Keragaman perilaku kelompok sasaran;
  - (3) Prosentase kelompok sasaran dalam totalitas penduduk;
  - (4) Ruang lingkup/derajat perubahan perilaku yang diinginkan.
- 2) Kemampuan keputusan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi, dengan indikator:
  - (1) Kejelasan dan konsistensi tujuan;
  - (2) Digunakannya teori kausal yang andal;
  - (3) Ketepatan alokasi sumber dana;
  - (4) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara institusi pelaksana;
  - (5) Aturan-aturan pembuatan keputusan dari institusi pelaksana;
  - (6) Komitmen dan rekrutmen para pejabat pelaksana;

- (7) Akses formal pihak luar.
- 3) Variabel di luar kebijakan/peraturan perundangan yang memengaruhi implementasi, ditentukan oleh indikator:
    - (1) Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi;
    - (2) Dukungan publik;
    - (3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat;
    - (4) Dukungan dari pejabat/institusi atasan yang berwenang;
    - (5) Komitmen dan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

d. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Subarsono (2016:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu: variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*contex of implementation*).

- 1) Variabel isi kebijakan ini mencakup:
  - (1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan;
  - (2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target groups*;
  - (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.;
  - (4) Apakah letak sebuah program sudah tepat;
  - (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;

- (6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
- 2) Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
    - (1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
    - (2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
    - (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
- e. Selain beberapa penjelasan model implementasi kebijakan publik di atas, penulis tertarik untuk merujuk pada pendapat Ripley dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:68-69), yang mengatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari dua perspektif, sebagai mana ia jelaskan: *“Implementation studies have two major foci: “compliance” and “what’s happening?”*. Perspektif pertama memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para *implementer* dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program), dengan cara pandang demikian studi implementasi yang menggunakan perspektif ini juga ingin mengetahui kepatuhan para bawahan dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh para atasan sebagai upaya untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Berbeda halnya dengan perspektif pertama, perspektif kedua tidak hanya memahami implementasi dari aspek kepatuhan para *implementer* kebijakan dalam mengikuti *standard operating*

*procedure* (SOP) semata-mata. Perspektif kedua ini berusaha untuk memahami implementasi secara lebih luas. Mengikuti pendapat Ripley tersebut maka ukuran keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari segi kepatuhan para *implementer* dalam mengikuti SOP namun demikian juga ukuran dari keberhasilan mereka dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa munculnya dampak kebijakan. Artinya, kepatuhan para *implementer* dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai SOP bukan satu-satunya alat ukur keberhasilan implementasi. Kepatuhan tersebut semestinya perlu dipandang sebagai kondisi yang harus dilalui agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan, bukan tujuan akhir dari implementasi itu sendiri. Pencapaian tujuan kebijakan tidak cukup hanya dengan mengikuti SOP saja akan tetapi akan sangat dipengaruhi oleh faktor yang lain seperti ketepatan instrumen kebijakan, kecukupan keluaran kebijakan, kualitas keluaran kebijakan, dan lain-lain. (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015: 69).

Berdasarkan penjelasan beberapa teori di atas mengenai model implementasi kebijakan publik, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Ripley. Hal ini karena dalam Pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji sesuai dengan teori yang dikemukakan Ripley pada perspektif pertama, yaitu untuk mengukur keberhasilan implementasi dapat dilihat melalui kepatuhan *implementer* dalam mengikuti SOP. Program Gerbang Desa Saburai dalam pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional

(PTO), di mana PTO tersebut merupakan *standard operating procedure* (SOP) dalam melaksanakan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji, sehingga hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Ripley pada perspektif pertama tersebut. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan melihat bagaimana pencapaian yang telah dihasilkan dari dilaksakannya Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji, yang juga sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan Ripley pada perspektif kedua, bahwa untuk mengukur keberhasilan implementasi tidak hanya dilihat dari segi kepatuhan para *implementer* dalam mengikuti SOP namun demikian juga diukur dari keberhasilan mereka dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa dampak kebijakan.

## **C. Tinjauan tentang Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Bintarto (1977:56) dalam *subiantogeografi. wordpress*, Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.



Berdasarkan beberapa pengertian desa di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang di tempati sejumlah penduduk yang di dalamnya memiliki organisasi pemerintahan terendah di bawah camat, dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui oleh pemerintahan nasional.

## 2. Dari Desa Lama Menuju Desa Baru

Pembaharuan desa menjadi isu sentral dalam kajian dan advokasi desa, menyusul lahirnya Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi dan demokrasi desa yang selama ini mengalami marginalisasi dalam ilmu pengetahuan, kebijakan dan advokasi, tampaknya menjadi isu utama dalam pembaharuan desa. Pembaharuan desa sebenarnya merupakan embrio teori preskripsi (berorientasi ke depan) tentang perubahan desa menuju kehidupan desa yang demokratis, mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

**Tabel 4. Perspektif Desa Lama Vs Desa Baru**

	<b>Desa Lama</b>	<b>Desa Baru</b>
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No.72/2005	UU No. 6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota ( <i>local state government</i> )	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i> .
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa.	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; terma suk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.

	<b>Desa Lama</b>	<b>Desa Baru</b>
<i>Delivery</i> kewenangan dan Program	Target	Mandat
Politik tempat	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam Pembangunan	Objek	Subjek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Sumber: Eko, 2014:11

#### 1) Posisi dan Relasi Baru

Kedudukan (posisi) desa dalam bangunan besar tatanegara Indonesia, sekaligus relasi antara negara, desa dan warga merupakan jantung persoalan Undang-Undang Desa. Paradigma atau asas yang mengkonstruksi hubungan negara dan desa sebenarnya sudah tertuang secara eksplisit dalam naskah akademik, yakni rekognisi dan subsidiaritas, tetapi keduanya tidak tertuang dalam naskah RUU Desa yang disiapkan oleh pemerintah.

Meskipun rekognisi sudah dituangkan dalam naskah akademik sebagai asas untuk menempatkan kedudukan desa yang berbeda dengan kedudukan daerah, namun asas itu belum dipahami dan dielaborasi dengan baik oleh kalangan pemerintah pada naskah RUU Desa yang muncul pada bulan September 2007. Bahkan asas rekognisi yang mengacu pada Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 itu belum tampak

kelas pada naskah RUU Desa yang disodorkan oleh pemerintah kepada DPR pada awal 2012. Pemerintah lebih cocok menggunakan Pasal 18 ayat 7 UUD 1945 yang sepadan dengan asas desentralisasi-residualitas, yang menempatkan desa sebagai pemerintahan semu, sama dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Eko, 2014:22-35)

## 2) Membangun Desa dan Desa Membangun

**Tabel 5. Perbedaan Konsep “membangun desa” (pembangunan pedesaan) dan “desa membangun” (pembangunan desa)**

Item/Isu	Membangun desa (pembangunan pedesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	<i>Functional</i>	<i>Locus</i>
Level	<i>Rural development</i>	<i>Local development</i>
Isu dan konsep-konsep terkait	Rural-urban linkage, market, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dll.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dll.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa.	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal.
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>2. Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, serta desa yang mandiri</li> </ol>

Item/Isu	Membangun desa (pembangunan perdesaan)	Desa Membangun (pembangunan desa)
Peran pemerintah Daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan
Peran desa	Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subjek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lintasdesa yang lebih baik</li> <li>• Tumbuhnya kotakota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota.</li> <li>• Terbangunnya kawasan hutan, collective farming, industri, wisata, dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga</li> <li>• Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (one village one product)</li> </ul>

Sumber: Eko, 2014:39

### 3) Desa Menggerakkan Pembangunan

Pembangunan desa tidak menjadi agenda nasional dalam RPJMN tetapi pemerintah tetap masuk ke desa dengan membawa program pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini menggunakan model pembangunan yang digerakkan masyarakat (*community driven development – CDD*), antara lain hadir dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan lain-lain. Berbagai program ini tidak sesuai lagi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Meskipun K/L hadir ke desa dengan atas nama pemberdayaan masyarakat, tetapi sekarang tidak boleh lagi masuk ke desa, sebab kandungan program-program itu menjadi domain

kewenangan lokal berskala desa, yang menjadi domain (diatur dan diurus) penuh oleh desa. Seorang pejabat eselon III Kementerian Keuangan berujar: “K/L tidak boleh lagi mengatur dan mengurus urusan desa yang ditetapkan oleh Undang-Undang Desa”. (Eko, 2014:44)

### **3. Desa Bergerak Membangun Ekonomi**

Tema “Desa Bergerak Membangun Ekonomi” merupakan bagian dari model pembangunan yang digerakkan oleh desa (*village driven development*), khususnya di sektor ekonomi. Kepala desa bersama masyarakat dapat memanfaatkan aset lokal maupun melakukan konsolidasi lahan subsistem menjadi lahan produktif, dengan pola pertanian kolektif, peternakan kolektif atau hutan kolektif. Gerakan ekonomi desa itu bisa bertahap dan sambil belajar, bisa mulai dari penanaman pohon produktif, kemudian bisa berkembang ke pertanian kolektif dan kalau sudah canggih desa bisa mengembangkan industri lokal. Berdasarkan pengalaman selama ini belum banyak desa yang hadir sebagai penggerak ekonomi lokal. Hal tersebut karena: pertama, tradisi berdesa yang masih lemah; kedua, kepala desa tidak mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengonsolidasikan aset ekonomi lokal; ketiga, pemerintah desa dan masyarakat sibuk mengelola dana bantuan dari pemerintah yang umumnya tidak diarahkan untuk membangun ekonomi kolektif, keempat, pembangunan desa selalu bias fisik, yang tidak sensitif pada gerakan ekonomi lokal. Kelima, desa tidak mempunyai dana memadai sebagai modal investasi ekonomi lokal. (Eko, 2014: 213-2014)

BUM Desa atau nama lain, sebenarnya bukan makhluk baru meskipun nomenklatur itu baru diperkenalkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Dulu kita mengenal berbagai institusi sosial dan institusi keuangan mikro yang dibentuk pemerintah: BKD, BINMAS, KUPEDES, KIK, KCK,

BUUD, KUD, UEDSP, LPD di Bali sejak 1985. Belakangan juga hadir berbagai nama dana bergulir yang dikelola kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh proyek-proyek sektoral kementerian seperti UPK dan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

BUM Desa dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. BUM Desa tentu juga bermaksud untuk memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. (*Eko, 2014: 248- 250*)

#### **D. Tinjauan tentang Program**

Program merupakan bagian dari perencanaan. Secara umum program diartikan sebagai penjabaran dari suatu perencanaan. Program sering pula diartikan sebagai suatu kerangka dasar dari pelaksanaan kegiatan. Berikut pengertian program menurut beberapa ahli:

- a) Kaytomo dalam Prayoga (2014:30) mengemukakan bahwa program adalah rangkaian aktivitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan.
- b) Manullung dalam Prayoga (2014:30) sebagai unsur dari suatu perencanaan, program dapat pula dikatakan sebagai gabungan dari politik, prosedur, dan anggaran yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu tindakan untuk waktu yang akan datang.

- c) Wahab dalam Prayoga (2014:30), mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan publik yang umumnya masih abstrak diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah ditanyakan dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan pengertian program menurut beberapa ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa program adalah turunan dari sebuah kebijakan, atau dengan kata lain program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan, program merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan.

Suatu program yang baik menurut Tjokromidjojo dalam Prayoga (2014:31) harus memiliki ciri-ciri:

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
  - b. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
  - c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
  - d. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
  - e. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
  - f. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.
- Dengan demikian dalam menentukan suatu program harus dirumuskan

secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Abdullah dalam Prayoga (2014:32) di dalam proses pelaksanaan suatu program sedikitnya terdapat tiga unsur yang penting antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (*implementer*) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Merancang (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
- b. Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dan serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang kurang lebih sama. Sebelum suatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang diharapkan.

## **E. Tinjauan tentang Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Definisi umum tentang kemiskinan menurut Sulistiyani (2017:17) adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.

Bank Dunia dalam Sulistiyani (2017:17) mendefinisikan kemiskinan sebagai *Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society*. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan adalah terkait dengan batas absolut standar hidup sebagian masyarakat miskin. Dengan demikian pengertiannya, maka apabila berbicara tentang kemiskinan akan menyangkut standar hidup relatif dari masyarakat. Pengertian yang kedua ini lebih mengarah pada batas kemiskinan relatif. Jika demikian halnya kemiskinan dapat diukur melalui perbandingan antara tingkat pendapatan dengan nilai kebutuhan hidup

minimum seseorang pada kurun waktu tertentu. Bertolak dari pengertian ini, maka kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan. Kondisi serba kekurangan tersebut berupa kurangnya aksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, kurangnya fasilitas pendidikan, dan fasilitas hidup lainnya.

## **2. Klasifikasi Kemiskinan**

Sulistiyani (2017:29) menjelaskan bahwa ada beberapa cara penggolongan kemiskinan, yang sering dijadikan sebagai pedoman untuk memahami substansi kemiskinan. Adapun penggolongan kemiskinan tersebut didasarkan suatu standar tertentu, yaitu:

Membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan penggolongan ini maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Komunitas yang termasuk di dalam kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, akan tetapi secara relatif mereka berada di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Diskursus lainnya yang mencoba menengahkan pembahasan kemiskinan dibedakan berdasarkan natural, kultur dan struktural.

Kemiskinan natural hampir sama pengertiannya dengan kemiskinan turun-temurun. Kemiskinan ini disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapkan oleh suatu komunitas, sehingga sulit untuk melakukan perubahan. Pada umumnya keterbatasan tersebut berupa kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang buruk, sehingga tidak dapat menyediakan fasilitas bagi komunitas di sekitarnya untuk mengusahakan aktivitas produksi untuk memperoleh pendapatan ekonomi layak. Kemiskinan kultural adalah kondisi miskin yang dihadapi oleh suatu komunitas, yang disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang hidup, diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian kemiskinan struktural merupakan suatu kemiskinan yang melanda suatu komunitas yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dibangun oleh manusia, sehingga menyebabkan kerugian pada suatu sisi. Apa yang dibangun oleh manusia kadang-kadang hanya menguntungkan beberapa pihak dan merugikan pihak lain.

## **F. Tinjauan tentang Program Gerbang Desa Saburai**

### **1. Profil Gerbang Desa Saburai**

Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) Provinsi Lampung adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan 2015-2019. Program Gerbang Desa Saburai ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung di mana salah satu *outputnya* adalah

memperpendek rentang kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Strategi yang dikembangkan dalam Gerbang Desa Saburai adalah dengan menggabungkan antara perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah provinsi. Program Gerbang Desa Saburai diimplementasikan melalui sinkronisasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Program Gerbang Desa Saburai diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, menyatukan program kegiatan, mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.

Program ini telah dimulai sejak tahun 2015, dengan tiga puluh Desa induk sebagai *pilot project* yang ditangani oleh Bappeda Provinsi Lampung dan telah di *launching* oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung pada tanggal 17 Desember 2015, di mana masing-masing desa tersebut mendapatkan bantuan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perdesa yang diperuntukan pembangunan desa terutama infrastruktur dan ekonomi. Pada tahun 2016 ada seratus desa tertinggal di mana tiga puluh desa merupakan lanjutan tahun 2015 dan tujuh puluh desa yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Lampung Nomor: G/523/II.09/HK/2015 tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2016, dengan bantuan dana yang diberikan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perdesa. Selanjutnya pada tahun 2017 ini sebanyak 250 desa yang beberapa desa di antaranya adalah lanjutan dari desa tahun 2015 dan 2016 serta

bantuan dana yang diberikan berkurang dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) perdesa. (<http://m.facebook.com/Bpmpd13lampung/posts/1716829005195512> diakses pada tanggal 5 Oktober 2017)

**Tabel 6. Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2017**

No	Kabupaten	Jumlah Desa
1	Tanggamus	53
2	Pringsewu	5
3	Lampung Barat	18
4	Lampung Utara	35
5	Pesawaran	20
6	Lampung Tengah	7
7	Lampung Selatan	12
8	Mesuji	21
9	Pesisir Barat	29
10	Waykanan	19
11	Tulang Bawang	15
12	Tulang Bawang Barat	12
13	Lampung Timur	4
	Jumlah	250

Sumber: <http://lampungprov.go.id/berita/gerbang-desasaburai-targetkan-380-desas.html> diakses pada tanggal 17 Juli 2017

## 2. Tujuan Program Gerbang Desa Saburai

- 1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas program antara provinsi - kabupaten dan antar SKPD guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan pada lokasi desa-desa tertinggal yang menjadi lokus program.
- 2) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perdesaan dalam pembangunan daerah.
- 3) Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan di wilayah perdesaan
- 4) Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan.

- 5) Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan serta menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan. (*Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 2017*)

### **3. Sasaran Lokasi Program**

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerbang Desa Saburai Tahun 2017 adalah di 250 desa kategori desa tertinggal yang diputuskan dengan Keputusan Gubernur Lampung atas Rekomendasi Tim Pembina Program Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Lampung. (*Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 2017*)

### **4. Jangka Waktu Pelaksanaan Program**

Program Gerbang Desa Saburai Provinsi Lampung ini pada Fase Pertama akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016 s/d 2019 yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tahun anggaran kegiatan Pemerintahan Provinsi Lampung. (*Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 2017*)

### **5. Prinsip Dasar Program Gerbang Desa Saburai**

Adapun Prinsip dasar Program Gerbang Desa Saburai adalah :

- 1) *Inisiatif*, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat di desa itu sendiri.
- 2) *Partisipatif*, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan

masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan.

- 3) *Demokratis*, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat desa maupun pada tingkat Kecamatan.
  - 4) *Manfaat*, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di wilayah desanya.
  - 5) *Gotong Royong*, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
  - 6) *Berkelanjutan*, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri.
  - 7) *Pemberdayaan*, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat memberdayakan seluruh potensi masyarakat desa sasaran.
- (*Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 2017*)

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Peneliti akan membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk melihat posisi penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti akan melakukan studi literatur terlebih dahulu terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan Program Gerbang Desa Saburai atau berkaitan dengan bantuan dana desa .

Tabel 7. Matriks Perbandingan Penelitian

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Penelitian Pertama</b>	<b>Penelitian Kedua</b>	<b>Penelitian Ketiga</b>	<b>Penelitian Saat ini</b>
	Endry Ardianto (Ilmu Administrasi Negara)	Rini Wulandari (Ilmu Pemerintahan)	Chici Afrianita Sinaga (Ilmu Pemerintahan)	Oktavia Dwi Sakti (Ilmu Administrasi Negara)
<b>Judul Penelitian</b>	Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Lampung Tengah	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan pedesaan tahun 2013 (di desa Gayau Sakti Lampung Tengah)	Efektivitas Program Gerbang Desa Sai Bumi Ruai Jurai dalam Pengentasan Desa Tertinggal (Di Desa Gedung Harapan Lampung Selatan)	Implementasi Program Gerbang Desa Saburai dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pakuan Aji Sukadana Lampung Timur
<b>Tujuan Penelitian</b>	Mengetahui pengelolaan dana desa dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa	Mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta faktor pendukung dan faktor penghambat	Mengetahui efektivitas Program GDS dalam pengentasan Desa Tertinggal	Menganalisis Implementasi Program Gerbang Desa Saburai dan Kendala-kendala dalam Implementasi Program Gerbang Desa Sabuari
<b>Fokus Penelitian</b>	Berfokus pada pengelolaan dana desa di kampung Ono Harjo dan Nambah Dadi serta faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan dana desa	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) : Kejelasan Pengelolaan ADD dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban. Serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan ADD	Penelitian ini berfokus pada penggunaan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 sebagai alat ukur dalam menentukan tingkat efektivitas Program GDS. IPD memiliki 5 dimensi yaitu: Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Akseibilitas/Transportasi, dan Pelayanan Umum	Penelitian saat ini berfokus pada pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai dan Kendala-kendala dalam pelaksanaan GDS tersebut



	<b>Penelitian Pertama</b>	<b>Penelitian Kedua</b>	<b>Penelitian Ketiga</b>	<b>Penelitian Saat ini</b>
<b>Teori yang Digunakan</b>	Fungsi Manajemen dari G.R. Terry yaitu <i>Planning, Organizing, Actuating dan Cotrolling</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007	IPD (indeks pembangunan desa) 2014	Model Implementasi Kebijakan Publik Oleh Ripley
<b>Hasil Penelitian</b>	<p>Pengelolaan dana desa 2015 di Kampung Ono Harjo dan Nambah Dadi yang diukur melalui fungsi manajemen G.R. Terry dikatakan sudah baik.</p> <p>Faktor pendukung: sekertaris kampung yang sigap, antusias warga yang tinggi dalam hal musrembang.</p> <p>Faktor penghambat: kebelum siapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang pelaksanaan dana desa secara mandiri, transparansi pengelolaan dana desa masih rendah, dan pemanfaatan IT yang belum maksimal</p>	<p>Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Mekanisme pencairan dan penyaluran sudah sesuai dengan ketentuan, namun dalam hal pelaksanaan pencairan dan penyaluran ADD terkesan lambat, belum terjadi pengawasan langsung oleh masyarakat, Pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat belum terjadi</p> <p>Faktor pendukung: antusiasme masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan ADD. Faktor penghambat: swadaya masyarakat yang masih rendah, partisipasi masyarakat yang masih rendah dan kualitas SDM Tim Pelaksana ADD</p>	<p>Dimensi pelayanan dasar dari segi fisik program GDS masih belum efektif, dari segi non-fisik mulai menunjukkan perkembangan.</p> <p>Dimensi Kondisi Infrastruktur, baik dari segi fisik maupun segi non-fisik mulai menunjukkan hasil yang signifikan.</p> <p>Dimensi Akseibilitas/trans portasi dari segi fisik masih blm efektif, dari segi non-fisik dapat membangun peran aktif masyarakat untuk meningkatkan kondisi akseibilitas di desa mereka.</p> <p>Dimensi Pelayanan Umum dalam segi fisik belum dikatakan efektif, segi non-fisik yaitu sudah mampu meningkatkan minat warga</p>	

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian Saat ini
<b>Hasil Penelitian</b>			untuk aktif berpartisipasi dan berperan dalam pemenuhan dimensi pelayanan umum.	

*Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017*

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terlihat baru ada satu penelitian yang membahas tentang Program Gerbang Desa Saburai, sisanya membahas tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Penelitian yang membahas tentang Program Gerbang Desa Saburai tersebut dibahas oleh Chici Afrianita Sinaga dari Jurusan Ilmu Pemerintahan dan penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015. Namun, fokus penelitian saudari Sinaga berkaitan dengan indeks pembangunan desa (IPD) sedangkan penelitian saat ini akan menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle untuk meneliti studi tentang implementasi Program Gerbang Desa Saburai.

## **H. Kerangka Pikir**

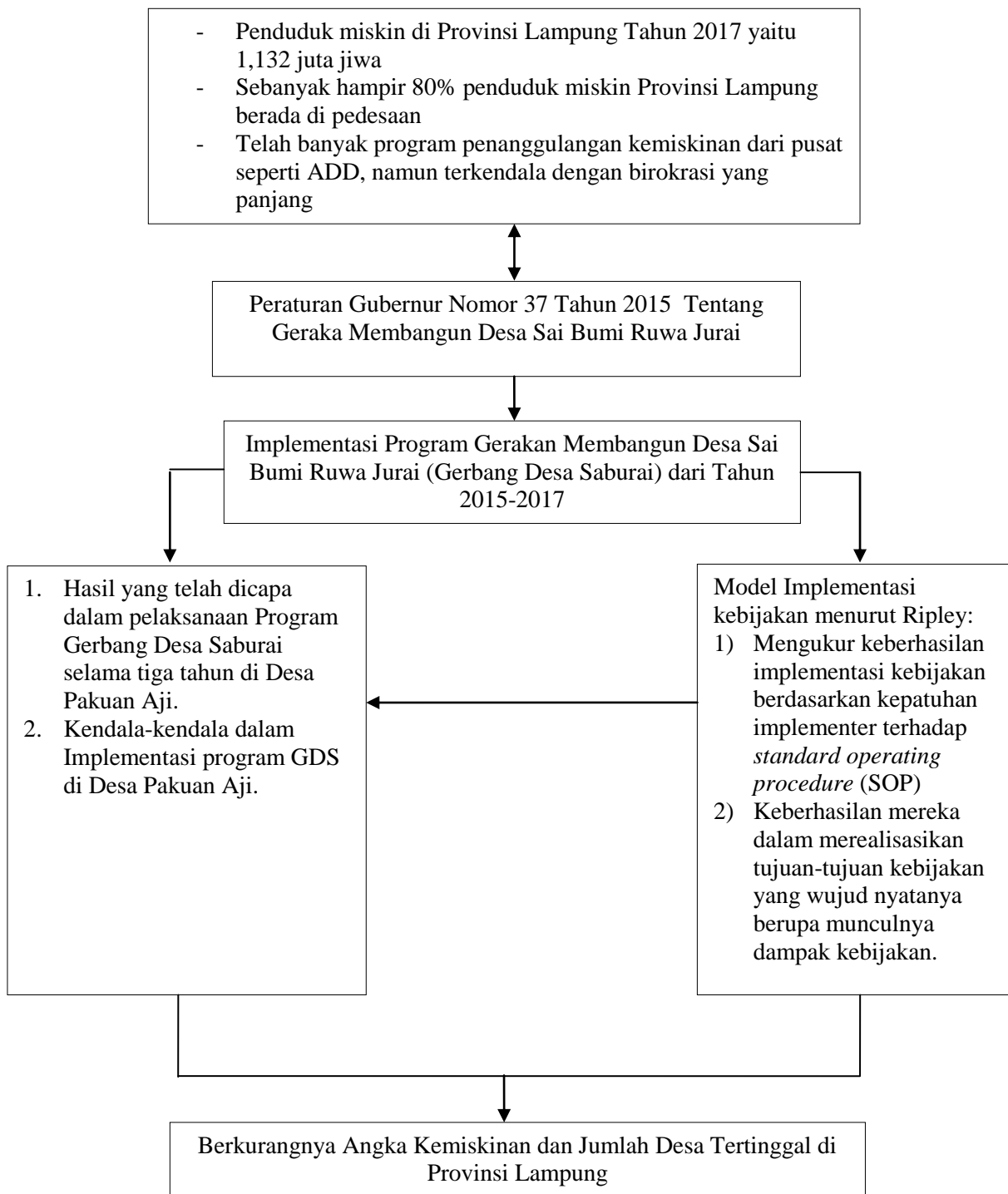
Berbicara masalah kemiskinan bukan merupakan isu baru, melainkan merupakan isu yang seolah abadi sepanjang jaman. Pada era yang sudah semakin canggih, kemiskinan masih tetap dominan, bahkan kemajuan zaman yang diekspresikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan modernitas, disatu sisi hanya memberikan kontribusi pada sebagian kecil penduduk saja.

Berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan, akan tetapi masih menemui jalan buntu. Seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program

Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), PNPM-Mandiri, belum dapat memberikan hasil yang spektakuler. Turunnya berbagai bantuan tersebut belum di tindak lanjuti dengan manajemen program yang tepat. Sehingga angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.

Provinsi Lampung sendiri merupakan provinsi termiskin kesepuluh se-Indonesia dan provinsi termiskin ketiga di Pulau Sumatra berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Hampir 80% jumlah penduduk miskin ini terletak di pedesaan dan 20% sisanya terletak di perkotaan. Maka, pembangunan pedesaan sebagai bagian dari pembangunan nasional harus mendapat prioritas utama. Sehingga dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan di pedesaan khususnya desa tertinggal, Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan Program Gerbang Desa Saburai dengan slogan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai . Program Gerbang Desa Saburai adalah suatu trobosan dalam percepatan pembangunan berbasis pedesaan yang diarahkan untuk penguatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan berbasis perdesaan, khususnya di desa tertinggal. Strategi yang dikembangkan dalam Gerbang Desa Saburai adalah dengan menggabungkan antara perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah provinsi.

Sehingga untuk melihat bagaimana implemetasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji, peneliti akan menggunakan model implementasi menurut Ripley yang sesuai dengan Implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji yaitu dengan melihat bagaimana kepatuhan para *implementer* dalam mengikuti SOP, selain itu juga dengan melihat kenerhasilan mereka dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa munculnya dampak kebijakan.



**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**

*Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell dalam Tresiana (2013:14) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai “sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik atau lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun berdasarkan sebuah latar alamiah (*natural setting*)”. Melalui jenis penelitian ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan bagaimana implementasi Program Gerbang Desa Saburai yang dilakukan oleh implementor sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### **B. Fokus Penelitian**

Irwan dalam Fuad & Nugroho (2014:31) menjelaskan bahwa dalam fokus penelitian menjelaskan tentang fokus kajian. Fokus adalah objek yang menurut peneliti paling menarik, paling bermanfaat, paling menantang untuk diteliti (*the object of interest*) dari peneliti. Fokus juga mengandung makna sesuatu yang unik

dan terbatas. Peneliti tidak meneliti segalanya, tetapi ia memiliki bagian tertentu dari suatu yang besar. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Implementasi Program Gerbang Desa Saburai dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Ripley dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:68-69).
2. Hasil yang diperoleh dalam Program Gerbang Desa Saburai selama tiga tahun di Desa Pakuan Aji Lampung Timur.
3. Kendala-kendala yang terdapat dalam implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji.

### **C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis**

#### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut berdasarkan berita yang dimuat di [kupastuntas.co](http://kupastuntas.co) bahwa terdapat tujuh puluh dua desa di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk desa tertinggal namun baru empat desa saja, yaitu dua desa induk dan dua desa tertinggal yang mendapatkan kucuran dana Gerbang Desa Saburai.

Selain itu, Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke tiga Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi seprovinsi Lampung dengan persentase sebesar 16,98% setelah Kabupaten Lampung Utara dan Pesawaran. (Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung tahun 2017).

#### 2) Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pakuan Aji Sukadana Lampung Timur. Peneliti memilih desa tersebut berdasarkan pertimbangan karena Desa Pakuan Aji merupakan satu dari dua desa induk

di Kabupaten Lampung Timur yang mendapatkan kucuran dana Gerbang Desa Saburai dari tahun 2015-2017. Selain itu, Desa Pakuan Aji merupakan desa induk dengan status desa kurang berkembang dengan nilai 66,67. Berdasarkan pertimbangan akses, desa pakuan aji dapat ditempuh dengan selang waktu yang tidak terlalu lama dan dengan akses jalan yang mudah, serta dalam implementasi Program Gerbang Desa Saburai, desa Pakuan Aji terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, dan pencairan dana yang terlalu lama.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2017:137), data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2017:137), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber terkait dengan Implementasi Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai) di Desa Pakuan Aji.

##### **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2017:137), data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui dokumentasi peneliti terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, serta data yang juga didapat dari berbagai macam media,

elektronik maupun cetak. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti antara lain:

- a) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Gerbang Desa Saburai (Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
- b) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 2017
- c) Profil Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- d) Laporan Penggunaan Dana
- e) RKPDes Desa Pakuan Aji
- f) Indeks Kemajuan Desa (IKD) Desa Pakuan Aji

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, sehingga data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sujarweni (2014:31-34) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen, dan diskusi kelompok terarah, adapun penjelasan dari masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut.

##### **1. Wawancara**

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2012:118) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan



tersebut. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dalam pelaksanaan/implementasi Program Gerbang Desa Saburai (Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai) di Desa Pakuan Aji. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 8. Daftar Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Data yang dibutuhkan
1	Tan Malaka	Kepala Desa Pakuan Aji	Pengenalan Program
2	Linus Hertanto	Fasilitator Desa Pakuan Aji	Pelaksanaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji
3	Ahmad Yudianto	TPK Desa Pakuan Aji	Pelaksanaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dalam pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji
4	Mugiono	Tokoh Masyarakat	Pemahaman mengenai Program Gerbang Desa Saburai
5	Tini	Masyarakat Desa Pakuan Aji	Pemahaman mengenai Program Gerbang Desa Saburai
6	Mardian	Masyarakat Desa Pakuan Aji	Pemahaman mengenai Program Gerbang Desa Saburai
7	Eka Purwaningsih	Masyarakat Desa Pakuan Aji	Pemahaman mengenai Program Gerbang Desa Saburai

*Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017*

## 2. Observasi

Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2012:131) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Melalui observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang akurat terkait dengan Implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Lampung Timur.

## 3. Studi Dokumen

Menurut Herdiansyah dalam Herdiansyah (2012:143) studi dokumen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 9. Daftar Dokumen**

No.	Dokumen
1.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Gerbang Desa Saburai (Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
2	Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 2017
3	Profil Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
4	Laporan Penggunaan Dana Program Gerbang Desa Saburai
5	Proposal Kegiatan Program Gerbang Desa Saburai

*Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2017*

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:244) teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dalam kedalaman wawasan tinggi, dalam penelitian ini peneliti memilah data yang dibutuhkan dalam Implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji.

2. Penyaji data (*data display*)

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari peneliti. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyaji data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memamparkann hasil temuan dalam wawancara dengan informan terkait dengan Implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji.

### 3. Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, terhitung sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penelitian menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul yang dikemukakan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, yaitu berupa teks naratif yang mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji, hasil yang telah dicapai selama tiga tahun dalam pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji, serta kendala-kendala yang terjadi selama proses implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji.

## G. Teknik Keabsahan Data

Menjaga tingkat kesahihan penelitian maka diperlukan media handal yang bermanfaat untuk mengeliminir derajat kesalahan dan perlunya tindakan urgen penelitian untuk menghindari *validity threat* (bias/validitas semu/validitas palsu). Terdapat beberapa teknik pembuktian (pemeriksaan) data yang efektif dalam penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Patto, Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:144) sebagai berikut.

### a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal ini disebabkan karena: pertama, peneliti dengan perpanjangan

keikutsertaan akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidakbenaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari informan, dan membangun kepercayaan subjek. Kedua, perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun ke dalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang, guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Ketiga, perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap penelitian dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

b. Pembuktian melalui ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Pembuktian melalui triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

d. Pembuktian pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara, atau hasil akhir yang diperoleh dalam benyuk diskusi analitik dengan rekan-rekan, penelitian ini penulis melakukan diskusi dengan dosen

pembimbing dan rekan-rekan sejawat jyang sedang melakukan penelitian dengan tema yang serupa guna menunjang kebenaran dari penelitian ini.

e. Pembuktian melalui kecukupan referensial

Konsep kecukupan referensi ini mula-mula diusulkan oleh eisner dalam Tresiana (2013:150) yang bermanfaat sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Film atau video-tape, misalnya, dapat digunakan sebagai alat perekam yang pada saat senggang dapat dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul, sehingga bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu-waktu diadakan analisis data dan penafsiran. Penulis mengumpulkan referensi berupa rekaman hasil wawancara (transkrip) dengan para informan, foto-foto dokumentasi guna menjadi salah satu acuan dalam menganalisis data.

Berdasarkan beberapa teknik keabsahan data yang telah diuraikan di atas, pada penelitian ini penulis memakai teknik keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh melalau wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan mengenai implementasi Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kepatuhan para *implementer* dalam mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) yaitu berupa buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang memiliki lima aspek yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji dimulai dari pengenalan kebijakan, organisasi pelaksana, alur tahapan kegiatan yang berisi enam kegiatan pokok, pengendalian dan diakhiri dengan pengelolaan pengaduan dan masalah, namun tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan Program Gerbang Desa Saburai masih sangat minim.
2. Pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji telah memberikan hasil yang nyata, yaitu dengan berhasil menjawab lima tujuan dari Program Gerbang Desa Saburai walaupun belum secara maksimal. Belum maksimal tersebut karena dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat melalui musyawarah-musyawarah desa belum

mampu mengahdirkan 60% dari jumlah keseluruhan penduduk di Desa Pakuan Aji. Selain itu dalam upaya meningkatkan gotong royong pun belum bisa dikatakan berhasil, karena masyarakat Desa Pakuan Aji dalam pelaksanaan gotong royong pembukaan badan jalan masih banyak yang tidak hadir, dan lebih memilih untuk bekerja. Selain mampu menjawab tujuan dari Program Gerbang Desa Saburai, juga mampu meningkatkan infrastruktur di Desa Pakuan Aji yaitu mampu membangun jalan *onderlagh* sepanjang 4050 meter, gorong-gorong sebanyak 12 buah dan tanggul penahan tanah (TPT) sepanjang 300 meter.

3. Pelaksanaan Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji tidak terlepas dari kendala atau hambatan. Faktor kendala atau hambatan tersebut di antaranya dari faktor isi kebijakan pada Program Gerbang Desa Saburai yang menyangkut kekurangan-kekurangan sumber daya pembantu seperti keterlambatan pencairan dana yang disebabkan karena dokumen pelaporan dana tahap satu belum diselesaikan. Belum terselesaikannya dokumen laporan tersebut karena proses pembangunan yang terkendala dengan musim hujan. Serta faktor dukungan yang meliputi kurangnya semangat gotong royong dari masyarakat desa pakuan aji yang akan memengaruhi pencapaian tujuan Program Gerbang Desa Saburai yaitu “meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan serta menimbulkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dilakukan”.



## **B. Saran**

1. Berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat mengenai Program Gerbang Desa Saburai di Desa Pakuan Aji yang masih minim, diharapkan para pelaksana Program Gerbang Desa Saburai di tingkat desa lebih ditingkatkan pengenalan program melalui sosialisasi-sosialisasi dalam acara-acara pengajian, dan juga dalam acara perkumpulan masyarakat seperti perkumpulan kelompok tani.
2. Berkaitan dengan kurang optimalnya pencapaian tujuan Program Gerbang Desa Saburai dalam meningkatkan partisipasi masyarakat diharapkan para pelaksana program di tingkat desa lebih meningkatkan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dan hadir dalam setiap kegiatan Program Gerbang Desa Saburai berupa musyawarah desa.
3. Berkaitan dengan kurangnya semangat gotong royong masyarakat, agar dilakukan pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi pentingnya gotong royong kepada masyarakat agar mampu mencapai tujuan Program Gerbang Desa Saburai dalam peningkatan gotong royong secara optimal.
4. Pengendalian Program Gerbang Desa Saburai melalui kegiatan pemantaun, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sudah efektif. Tetapi harap lebih ditingkatkan dalam pengawasan pemeliharaan hasil kegiatan agar infrastruktur yang dibangun terawat dengan baik dan dapat menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mohammad. 2009. *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Bandung: Intima
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Eko, Utoro dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD
- Fuad, Anis dan Nugroho, Kandung Sapto. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamidi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisa dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Hermawan, Dedy dan Hutagalung, Simon Sumanjoyo. 2017. *Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: GAVA MEDIA
- Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera

- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Medika
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

## **B. Dokumen**

- Peraturan Gubernur Lampung No. 37 Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Tahun 2015-2019
- Profil Desa Pakuan Aji Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Gerbang Desa Saburai Tahun 2017
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

## **C. Sumber Karya Tulis Ilmiah**

- Ardianto ,Endry. 2016. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Prayoga, Agryan wahyu. 2014. *Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kali Deres Jakarta Barat*. Skripsi. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sinaga, Chici Afrianita. 2017. *Efektivitas Program Gerakan Memabangun Desa Sai Bumi Ruai Jurai dalam pengetasan Desa Tertinggal (studi Kasus Desa Gedung Harapan Kecamatan JatiAgung Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Wulandari,Rini. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan perdesaan tahun 2013 (studi pada desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Lampung Tengah)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

#### **D. Sumber Blog**

Data Kemisikinan <https://lampung.bps.go.id> diakses pada tanggal 22 Juli 2017

*Warning KPK "Ada 14 Potensi Masalah Dana Desa"* <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/06/13/warning-kpk-ada-14-potensi-masalah-dana-desa> diakses tanggal 5 September 2017

Jaya, Aziz Satria. 2016. *Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung*. [http://m.facebook.com /Bpmpd13lampung/posts/1716829005195512](http://m.facebook.com/Bpmpd13lampung/posts/1716829005195512) diakses tanggal 5 Oktober 2017

*Naik kelas, Aceh jadi Provinsi Termiskin di Sumatra*. <http://www.beritakini.co/news/naik-kelas-aceh-jadi-provinsi-termiskin-di-Sumatra/index.html> diakses tanggal 20 Agustus 2017

*Gerbang Desa Saburai Targetkan 380 desa* <http://lampungprov.go.id/berita/gerbang-desa-saburai-targetkan-380-desa.html> diakses tanggal 17 Juli 2017

*Agar Masyarakat Tidak Di Rugikan, Transparansi Pelaksanaan Gerbang Desa Harus Dilaksanakan*. <http://www.forumdesa.com/2017/09/agar-masyarakat-tidak-di-rugikan.html> diakses tanggal 09 Oktober 2017

*Pelaksanaan Program Gerbang Saburai Dievaluasi* <http://lenteraswaralampung.com/berita-8150-pelaksanaan-program-gerbang-saburai-dievaluasi.html> diakses tanggal 09 Oktober 2017

<https://subiantogeografi.wordpress.com/pengertian-desa-dan-kota/diaksestanggal-17-September-2017>)